



20.000 Pekerja Belum Jadi Peserta

BPJS Ketenagakerjaan Gencar Lakukan Sosialisasi

YOGYA. TRIBUN - BPJS Ketenagakerjaan mendorong pelaku UMKM untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Aiunul Kholid mengatakan, para pekerja UMKM justru paling butuh jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau perusahaan saat ini sudah terbantu dengan OSS, dalam mandatori harus ada rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga otomatis ter-cover dua BPJS. Tetapi untuk UMKM tidak,"

padahal pelaku UMKM justru memiliki (rikiso) kecelakaan kerja yang lebih tinggi," katanya saat ditemui di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (28/2).

Menurut data Dirjen Pajak Yogyakarta, ada sekitar 32.000 pekerja yang memiliki Nomor Pokok Wajib

• ke halaman 15

Makanya dari BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk gencar melakukan sosialisasi.

Aiunul Kholid
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta

20.000 Pekerja Belum

• Sambungan Hal 9

Pajak (NPWP). Dari jumlah tersebut, hanya 10.408 yang menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, lebih dari 20.000 pekerja belum aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Padahal (pekerja) UMKM belum tentu memiliki NPWP, paling hanya memiliki izin usaha. Jumlahnya pun pasti juga ribuan UMKM. Makanya dari BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk gencar melakukan sosialisasi, agar bisa menjangkau UMKM di DIY, supaya bisa ter-cover," paparnya.

Kholid menjelaskan, kecelakaan kerja bukan hanya berdampak pada kesehatan pekerja saja. Tetapi juga berimbas pada penghasilan, bahkan hingga angka kemiskinan.

Misal pekerja kecelakaan, sehingga tangannya putus. Kalau mengalami kecelakaan tentu perlu pengobatan, berarti belum bisa kerja. Setelah mengalami kecelakaan juga belum tentu bisa langsung kerja. Berarti pekerja tersebut akan kehilangan upah dulu sementara waktu," jelasnya.

"Jika nanti akhirnya tidak bisa bekerja lagi, maka akan kehilangan penghasilan. Kemudian akan berdampak ke ekonomi keluarga, bisa berimbas pada kemiskinan. Jika meninggal sama saja, keluarga juga kehilangan tulang punggung," sambungnya.

Peran penting
Kepala Bidang Pemasaran dan Perencanaan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Adi Hendarto menambahkan, BPJS memiliki peran penting jika pekerja mengalami kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan bahkan memberikan santunan ketika pekerja meninggal dunia.

"Kalau hanya BPJS Kesehatan, maka hanya pengobatannya saja yang dibantu. Sementara kalau ada BPJS Ketenagakerjaan mulai dari pengobatan, nanti kami ada klaim itu keceलाannya sendiri. Jika nanti meninggal kami juga akan memberikan santunan, itu tidak diberikan BPJS Kesehatan," tambahnya.

BPJS Ketenagakerjaan pun memiliki banyak program, bahkan ada program tabungan jaminan hari tua, hingga jaminan pensiun. Namun bagi UMKM, bisa mengikuti dua program saja, yaitu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian.

"Potongannya hanya sedikit, hanya 0,24% dari pendapatan. Jika paling tinggi UMK itu Rp1,8 juta, maka untuk dua program itu hanya cukup lunas Rp10 ribu saja. Dengan iuran itu sudah mendapat jaminan saat kecelakaan, gaji saat tidak bekerja juga diberikan, kematian baik karena kecelakaan atau tidak tetap kami berikan santunan," jelasnya.

Pihaknya pun berharap agar semua pelaku UMKM dapat ter-cover BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan gencar melakukan sosialisasi bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait hingga ke komunitas-komunitas.

(mas/tim kota)

UMKM Diminta Bergabung

KEPALA Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan, kecelakaan kerja di Kota Yogyakarta cukup tinggi, khususnya untuk UMKM. Sebab itu, pihaknya

mendorong pekerja dan pelaku UMKM memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

"Paling banyak justru kecelakaan di jalan, tetapi masih dalam pekerjaan. Misal sedang belanja kemudian tertabrak bus, atau sedang mengantar sesuatu kemudian kecelakaan. Kalau di Kota

● ke halaman 15

UMKM Diminta

● Sambungan Hal 9

Yogyakarta rata-rata karena itu, yang kecelakaan di lokasi kerja masih sedikit," katanya kepada *Tribun Jogja*, Kamis (28/2).

Ia menjelaskan dengan banyaknya kecelakaan kerja, pihaknya mendorong khususnya UMKM juga me-

miliki BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya UMKM memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi.

Pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi, hal itu dilakukan agar semakin banyak pekerja yang ter-cover BPJS Ketenagakerjaan. Ia pun prihatin jika ada pekerja yang kehilangan penghasilan setelah mengalami kecelakaan kerja.

"Tahun ini kami gencar sosialisasi, karena masih sedikit yang tahu pentingnya BPJS Ketenagakerjaan ini. Harapannya tentu sosialisasi lebih ditingkatkan agar masyarakat paham. Tentu kami prihatin jika ada yang harus kehilangan penghasilan, tentu imbasnya pada ekonomi di keluarga tersebut," jelasnya. (maw/tim kota)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005